

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aktivitas untuk menciptakan suatu perdamaian dalam konflik negara diperlukan sebuah resolusi oleh aktor internasional, terutama seringkali melibatkan kekuatan militer baik dilakukan oleh individu maupun oleh organisasi internasional. Saat perkembangan sistem internasional menjadi sebuah sistem yang multipolar akan merubah perspektif masyarakat internasional untuk merubah resolusi konflik menjadi pendekatan non-militer, seperti negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi. Hal ini menyebabkan pendekatan tersebut menjadi pertimbangan posibilitas jangka panjang serta *cost-benefit* yang akan diterima oleh pihak yang bersangkutan (Martin & Ramsbotham, 2016).

Dalam perkembangan suatu sistem tidak mengesampingkan bagaimana *natural behavior* aktor khususnya di dalam sebuah negara dalam merespon masalah keamanannya. State insecurities masih sering terjadi yang mengartikan bahwa keadaan anarkis tidak dapat di hapuskan seluruhnya termasuk metode yang digunakan dalam menunjang persentase perdamaian yang cukup besar. Hal ini dikarenakan konflik yang terjadi sangat sering memicu krisis yang jauh lebih besar yang disebabkan oleh adanya respon timbal balik yang buruk dari pihak yang terlibat konflik (Urlacher, 2018). Dalam hal ini Prancis memiliki pandangan terhadap terorisme, Prancis memandang bahwa terorisme adalah ancaman terbesar dalam sebuah keamanan dan perdamaian dunia. Prancis juga merupakan negara anggota Uni Eropa yang paling sering terkena dampak oleh serangan para terorisme muslim (Reynie, 2021).

Untuk melawan serangan terorisme yang dihadapi oleh Prancis dalam dunia internasional, Prancis memiliki beberapa strategi dalam mengatasi hal tersebut sebagai berikut :

1. Mengurangi kelompok-kelompok terorisme secara regional;
2. Memerangi berbagai biaya, logistik, dan segala jaringan propaganda teroris;
3. Mencegah aksi radikalisasi;
4. Melindungi kepentingan warga negara Prancis di luar negeri.

Untuk mewujudkan kepentingan tersebut, tindakan Prancis untuk melawan masalah terorisme di lingkup internasional meliputi :

1. Tindakan tegas terhadap militer;
2. Menstabilkan wilayah yang menjadi target dalam konflik;
3. Mencari solusi melalui politik ;
4. Meningkatkan tindakan oleh Uni Eropa
5. Meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam memerangi masuknya pendanaan terorisme.

Basis terorisme merupakan ancaman besar bagi komunitas internasional yang berbasis menjadikan sarang terorisme yang mengakibatkan terjadinya penindasan terhadap penduduk lokal dan penyebaran ideologi ekstrimis (France Diplomacy, 2023). Dalam beberapa tahun terakhir , kelompok teroris terus berupaya dalam memperluas kehadirannya terutama di wilayah Afrika. Dalam hal ini Prancis menjadi aktor dalam upaya memerangi masalah terorisme di wilayah Afrika, terutama di Mali. Prancis memiliki strategi *war on terror* dalam upaya menstabilisasikan kondisi keamanan di wilayah benua Afrika, salah satunya di Mali. Strategi tersebut dapat digunakan melalui berbagai upaya seperti beberapa operasi militernya dimana Prancis memiliteralisasi wilayah dan bekerja dengan para pemimpin politik sebagai sekutu dalam *war on terror* (Wing, 2016).

Semenjak terjadinya kemerdekaan Prancis, negara tersebut telah melakukan intervensi militer sebanyak lebih dari 50 kali di benua Afrika. Prancis melakukan berbagai operasi militer sebagai wujud intervensi atas respon dari masalah-masalah domestik bekas negara jajahannya. Seperti yang terjadi di negaranya yaitu Mali, negara yang memiliki masalah berupa kelompok pemberontak Islam yang mengancam negaranya. Presiden Mali yaitu Ibrahim Keita meminta bantuan pihak Prancis untuk meminta bantuan dalam melawan kelompok terorisme yang telah menguasai bagian utara Mali dan sedang berjalan menuju selatan pada tahun 2013.

Adanya ketidakamanan akibat pemberontak dan kelompok teroris menyebabkan tindakan migrasi yang dimana orang-orang pindah ke negara-negara Eropa untuk mempertahankan diri. Mali yang merupakan negara bekas jajahan Prancis yang mendapatkan kemerdekaanya sejak tahun 1960, karena hal itu

membuat Prancis dan Mali menjalin hubungan diplomasi. Dimana salah satunya adalah menjadikan Prancis sebagai relasi dalam menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian di Mali. Terjadinya pemberontakan oleh kelompok teroris menyebabkan adanya peluang dalam penyebaran atau migrasi yang dilakukan masyarakat mali terhadap negara Prancis (Pujari,2020).

Pada 10 Januari 2013 pemerintahan Mali yang dipimpin oleh Dioncounda Traore memberlakukan militer diseluruh wilayah Mali. Karena kontrol yang melemah pasca kudeta *Movement for The Liberation of Azawad* (MNLA) yang telah melakukan koalisi dengan kelompok teroris seperti Ansar Dine, *al-Qaeda in the Islamic Maghreb* (AQIM), dan *Movement for Unity and Jihad in West Africa* (MUJAO) mengalami perbedaan visi sehingga mendorong MNLA untuk mengakhiri kerjasamanya diantara kelompok tersebut dan mengakibatkan konflik yang memperparah kondisi di Mali. Dampak yang ditimbulkan ialah peningkatan jumlah pengungsi, ketimpakan politik,sosial, ekonomi, pelanggaran HAM, perusakan infrastruktur dan dampak terhadap bidang pendidikan. Menurut "*Human Development Index*" (HDI) pada tahun 2011-2018, tingkat kesehatan, pendidikan, penghasilan atau pendapatan di Mali berada pada posisi yang cukup memprihatinkan yaitu pada peringkat ke 182 dari 189 negara.

Karena melemahnya sistem pemerintahan negara karena ketidakmampuan dalam mengatasi berbagai masalah yang mengancam warga dan keamanan negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik namun upaya tersebut dianggap tidak efektif untuk membantu menangani permasalahan itu. Akhirnya, Traore mengalami kewalahan dan memohon bantuan kepada perancis untuk menghentikan pemberontakan oleh Tuareg. Kemudian Kementrian Pertahanan Perancis setuju melakukan intervensi militer guna menghentikan pemberontakan di Mali dan melindungi warga negara Perancis yang berada di Negara Mali dengan membatasi pergerakan Mujahidin yang sering menculik warga Perancis. Intervensi ini dilakukan untuk meminimalisir kekuatan Pemberontak yang anti-Barat (Perancis) agar Mali tidak jatuh menjadi sebuah negara islam yang radikal (Paul Melly,2013)

Perancis memiliki kepentingan dalam meyakini bahwa keberadaan negara

Mali sedang di pertaruhkan dan mampu mengancam kedaulatan negara Mali sendiri. Namun di sisi lain Perancis memiliki rasa tanggung jawab yang besar sebagai sebuah negara yang pernah menjajah atau memiliki keterkaitan dengan Mali. Hal ini dikarenakan negara Perancis menganggap kedaulatan Negara Mali sedang merasa terancam sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk menolong negara Mali (Tempo.co,2013).

Presiden Hollande mengumumkan sebuah peluncuran operasi militer yang diberi nama Operasi Militer Serval. Operasi ini berfungsi untuk mengacaukan ekstremis dan menstabilkan kawasan, termasuk negara-negara tetangga seperti Niger, Aljazair, Nigeria, dan Mauritania. Sekitar 4.000 orang pasukan Perancis didukung oleh 2.000 pasukan Chad yang bertindak melalui koordinasi dengan pihak wewenang Mali (Callimachi, 2014). Operasi ini mendapatkan kesuksesan karena berhasil memukul mundur pemberontak islam dan mengamankan kendali atas kota-kota di Mali Utara yang dapat dilihat dari terbunuhnya beberapa pemimpin kelompok Islam militan dan beberapa kelompok tersebut mengalami kekalahan baik dari kota maupun pegunungan. Walaupun operasi militer Perancis cepat dan sukses, dengan wilayah lahan terbuka luas dalam mengendalikan Sahel dari munculnya ancaman teroris merupakan tantangan yang berat karena membuat pemerintah pusat menjadi lemah sehingga kelompok teroris dapat beroperasi secara transnasional tanpa banyak hambatan (Aronson,2014).

Pada tahun 2014 operasi militer Serval diklaim telah mencapai tujuannya, akan tetapi Perancis mengubah intervensi militernya menjadi misi kontraterorisme kompleks yang disebut dengan Operasi Barkhane. Pasukan Perancis beroperasi secara regional, melintas dan didalam perbatasan negara-negara G5 Sahel yaitu Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger dan Chad. Operasi Barkhane menandai tempat-tempat, ruang-ruang dan teritori di Afrika Barat sebagai medan transnasional untuk memerangi kekuatan teroris, sebuah objek dan ruang intervensi, sebuah medan yang disebut 'tak terkendali' untuk menghasilkan bentuk-bentuk baru tata kelola keamanan. Jangkauan regional Barkhane ini memungkinkan pemerintah Perancis untuk mengklaim bahwa mereka tidak ikut campur dalam urusan internal negara-negara Sahel karena mereka juga mengubah peta regional

dan batas-batas sah politik modern (Charbonneau, 2017).

Kepemimpinan militer dan diplomatik Perancis dalam melakukan tata kelola pemberantasan pemberontakan di Sahel mendapatkan dukungan dari Pemerintah Amerika terutama dalam hal kemampuan intelejen, pengawasan dan pengintaian (ISR) (Stephen Tankel, 2020). Dukungan terhadap kepemimpinan Perancis terkait erat dengan prinsip yang terdapat dalam resolusi Dewan Keamanan PBB (Marie & Nissen, 2020). Parameter utama organisasi, kelembagaan, dan hukum intervensi internasional di Sahel ditentukan oleh dan melalui mandat dari berbagai penafsiran Misi Multidimensi PBB di Mali (MINUSMA). Prioritas strategi MINUSMA sejak pembentukannya di tahun 2013 untuk mendukung upaya stabilisasi, memulihkan otoritas Mali dan sejak tahun 2015 untuk membantu implementasi perjanjian perdamaian.

Intervensi militer Perancis mampu mendorong mundur kelompok-kelompok bersenjata yang menduduki wilayah utara Mali, namun membuat pelanggaran hukum dan bersenjata semakin meningkat pada pertengahan tahun 2014. Pada tahun 2015 hingga 2016 pelanggaran semakin memburuk dan menyebar ke wilayah pusat Mali dan menjadi tahun yang paling mematikan bagi pasukan Perancis yang berpartisipasi dalam Operasi Barkhane. Karena terdapat tiga tentara perancis terbunuh ketika melakukan operasi penyisiran anggota grup teroris bersenjata. Selanjutnya tentara Perancis lainnya yang terbunuh akibat ledakan sebuah ledakan di tambang (The Guardian, 2016). Pertempuran semakin memanas antara pasukan Perancis dengan kelompok-kelompok Jihad pada tahun 2017 hingga 2018. Sejak dimulainya baik Operasi Serval maupun Barkhane telah banyak menelan korban dan mengalami kerugian. Saat itu juga muncul aktivis JNIM (Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin) yang merupakan koalisi grup teroris bersenjata yang berafiliasi dengan Al-Qaeda melancarkan serangan ke pangkalan militer Perancis yang menyebabkan beberapa tentara Prancis terluka.

Tekanan dalam tuntutan mitra eksternal dengan tuntutan politik warga negara secara tidak langsung melemahkan negara Mali dengan melemahnya garis akuntabilitas dan legitimasi. Hal ini menyebabkan negara menjadi lebih bergantung pada sekutu asing dan kekuatan koersif untuk bertahan hidup yang semakin

melemahkan legitimasinya, sehingga membutuhkan kekuatan sekutu asing dan militer untuk mempertahankan akhirnya menyebabkan lebih banyak lagi negara yang lemah. Banyaknya protes-protes yang memberikan tekanan besar membuat hubungan Perancis-Mali semakin memburuk selama tahun 2019-2020, hal itu diperlihatkan melalui Presiden Perancis yang enggan mengirim pasukan tambahan ke tempat yang tidak mereka inginkan (Gazeley, 2022).

Walaupun Operasi Barkhane merupakan operasi kontraterorisme yang berfokus melawan terorisme, strategi perancis di Sahel Mali tidak semata-mata bersifat militer namun membawa solusi atas krisis yang terjadi secara komprehensif, politis, terkait keamanan dan ekonomi. Selama dua tahun intervensi berikutnya membuat misi dan kondisi dilapangan menjadi kurang menguntungkan bagi pasukan Perancis dan mitra Barat mereka sehingga memilih untuk menarik pasukan militernya dari Mali. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada analisis terhadap penarikan Operasi Militer Perancis dalam menyelesaikan masalah terorisme di Mali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti memfokuskan pertanyaan penelitian tentang " Mengapa Perancis melakukan penarikan operasi militernya dalam menghadapi konflik di wilayah Mali?"

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di wilayah Mali.
- b. Untuk mengetahui upaya operasi militer Perancis dalam membantu menyelesaikan permasalahan terorisme di Mali.
- c. Untuk menganalisa penyebab penarikan militer Perancis dari Mali.
- d. Untuk menganalisa rasionalitas Perancis dalam keputusan penarikan operasi militernya dalam penyelesaian permasalahan terorisme di Mali.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan penyebab penarikan operasi militer oleh Prancis dalam menyelesaikan masalah terorisme di Mali dan diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya yang kemudian menjadi acuan dalam memperkaya khasanah ilmu dalam kajian Hubungan Internasional.

1.4 Sistematika Bab

Bab I berisi latar belakang awal masuknya intervensi militer Prancis di Mali, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika bab.

Bab II yang merupakan tinjauan pustaka, yang mana berisi landasan teoritis dan penelitian terdahulu.

Bab III yang merupakan metode penelitian, dalam bab ini penulis akan menguraikan jenis penelitian dan metode yang digunakan dalam proses analisa dan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Bab IV yang merupakan hasil pembahasan, yang menjelaskan bagaimana dinamika konflik terorisme di wilayah Mali sehingga menyebabkan terjadinya intervensi melalui operasi militer Prancis. Yang kemudian menjelaskan bagaimana akhir dari operasi tersebut yang di lakukan melalui penarikan operasi militer yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor dan keputusan rasionalitas Prancis dalam menarik operasi militernya dari Mali dalam menyelesaikan permasalahan terorisme.

Bab V yang merupakan penutup, yang berisi kesimpulan penulisan.